

Effective Tax Rate: Efek dari Corporate Governance

May Wulandari¹⁾, Dovi Septiari²⁾

¹⁾ Politeknik Negeri Batam

Jurusan Manajemen Bisnis

Parkway street, Batam Center, Batam 29461, Indonesia

E-mail: may.wulandari_1993@ymail.com

²⁾ Politeknik Negeri Batam

Jurusan Manajemen Bisnis

Parkway street, Batam Center, Batam 29461, Indonesia

E-mail: dovi@polibatam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *effective tax rate* (ETR). Sampel penelitian adalah 27 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 – 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan saham institusional, dan komite audit internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate*, sedangkan kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa keefektifan perencanaan pajak perusahaan bergantung pada mekanisme *corporate governance* perusahaan.

Kata kunci: *Effective tax rate, Corporate governance, Corporate tax planning*

Abstract

This research investigate the influence of corporate governance mechanisms on the effective tax rate (ETR). The sample is 27 listed companies in the Indonesia Stock Exchange in 2010 – 2013. The results show that the board size, proportions of independent board, institutional ownership, and the internal audit committee has a significant effect on effective tax rate, while managerial ownership has no effect. This result indicates that effectiveness of corporate tax planning depend on firm corporate governance mechanism.

Keywords : *Effective tax rate, Corporate governance, Corporate tax planning*

1. PENDAHULUAN

Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya [11]. Strategi manajemen pajak yang dipilih perusahaan sangat bergantung pada struktur *governance* dan kompensasi yang ada [13].

Manajer dan pemilik perusahaan memiliki perbedaan kepentingan dalam melakukan pengukuran pajak yang berkaitan dengan *corporate governance*. *Corporate governance* memiliki tujuan agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik [1]. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik, akan berhasil dalam mengelola pajaknya.

Penelitian ini menginvestigasi apakah mekanisme *corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham manajerial, dan komite audit internal berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Penelitian dilakukan menggunakan

data dari 27 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan saham institusional, dan komite audit internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate*, sedangkan kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*. Pembahasan artikel ini dilanjutkan dengan telaah literatur yang membangun hipotesis, dilanjutkan dengan metode penelitian, hasil dan pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Penerapan *Corporate Governance* didasarkan pada teori agensi. Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul disaat satu orang atau lebih

(*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut [10]. Dalam hal ini manajer perusahaan (*agent*) mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi tentang perusahaan kepada pemegang saham (*principal*), tetapi terkadang manajer tidak melaporkan seluruh keadaan perusahaan yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah agensi (*agency problem*), yaitu konflik antara pemilik dan manajer perusahaan.

2.2 Effective Tax Rate (ETR)

Effective tax rate (ETR) adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak [7]. Semakin rendah nilai *effective tax rate* (ETR) maka semakin baik nilai *effective tax rate* (ETR) disuatu perusahaan dan baiknya nilai *effective tax rate* (ETR) tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak. Beban pajak yang digunakan hanya menggunakan beban pajak kini karena pada beban pajak kini dimungkinkan untuk melakukan pemilihan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi.

2.3 Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola, perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan dan mengatur perusahaan. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 prinsip-prinsip *good corporate governance* meliputi kemandirian, transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajiban. Penerapan *corporate governance* memiliki manfaat, yaitu meningkatkan pelayanan serta mendorong perusahaan untuk lebih transparansi kepada *stakeholders*, membantu dewan pengawas dan manajemen perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan berdasarkan tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan apabila perusahaan memiliki *corporate governance* yang bagus maka hal ini dapat menambah kepercayaan investor terhadap perusahaan. [9] menjelaskan bahwa struktur *corporate governance* juga dapat mencegah atau menghambat perencanaan pajak yang tidak diinginkan atau setidaknya mudah untuk dideteksi. Menurut [17] dalam mencapai tujuannya perusahaan harus menerapkan prinsip-

prinsip dari *corporate governance* diantaranya adalah kewajiban, keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi. Masing-masing mekanisme *corporate governance* akan dijelaskan dibawah ini.

2.3.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan pengarah atau nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan [19]. Dewan komisaris sebagai anggota organisasi perusahaan harus melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Banyaknya anggota dewan komisaris di suatu perusahaan maka dapat menyulitkan dalam menjalankan peran dan tugas mereka, diantaranya adalah kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan. Penelitian yang dilakukan [4], menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh dalam melakukan penentuan pengukuran perencanaan pajak sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai *effective tax rate*

2.3.2 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan tersebut [17]. Komisaris Independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Komisaris independen memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik dalam penerapan *corporate governance*. Keberadaan dewan komisaris ternyata belum bisa memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip *corporate governance*, khususnya mengenai perlindungan terhadap investor serta komisaris independen mempunyai sikap objektif dan memiliki risiko yang kecil dalam konflik internal. Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat terjadinya keseimbangan dalam perusahaan antara manajemen perusahaan dan para *stakeholder*-nya. [3], berpendapat bahwa dewan komisaris independen merupakan pilihan yang paling menonjol untuk mekanisme *corporate governance*. Keberadaan komisaris independen berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-2004

mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk dapat memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris. Komisaris independen mengarahkan perusahaan berdasarkan kepada aturan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menentukan strategi kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek yang dapat menguntungkan perusahaan yang terkait dengan meminimaliskan pembayaran pajak. Menurut peneliti [18], kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi, sehingga dapat berpengaruh terhadap manajemen untuk meminimalkan tingkat *effective tax rate* suatu perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Proporsi komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai *effective tax rate*

2.3.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya pada akhir tahun [20]. Kepemilikan institusional bertugas mengawasi pihak yang berasal dari eksternal dan mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, agar perusahaan dalam menghasilkan laba sesuai berdasarkan pada aturan yang berlaku. Investor institusional mendorong manajemen untuk menjadikan tata kelola yang lebih baik pada perusahaan. Investor institusional ini juga berupaya mempengaruhi manajemen untuk meminimaliskan beban pajak, karena pajak merupakan beban yang mengurangi laba setelah pajak perusahaan. Selain itu kepemilikan institusional juga mempunyai peranan yang penting dalam mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Penelitian yang dilakukan [12], menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktek manajemen pajak. Investor mengharapkan laba yang tinggi dan akan mendapatkan pembagian deviden yang cukup tinggi pula, namun bagi manajemen laba yang tinggi akan berpengaruh dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kepemilikan saham institusional mempunyai pengaruh dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan tingkat pajak efektif, sehingga hipotesis penelitian ini adalah:

H₃: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap nilai *effective tax rate*

2.3.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen baik direksi, komisaris maupun karyawan dengan

persyaratan tertentu untuk memiliki saham. Menurut [2], kepemilikan manajerial merupakan jumlah dari kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Kepemilikan saham oleh manajemen akan mengurangi masalah agensi diantara manajer dan pemegang saham yang dapat dicapai melalui penyesuaian kepentingan diantara pihak-pihak yang berbenturan kepentingannya. Kepemilikan manajerial dapat memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerjanya sehingga akan berdampak baik terhadap perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Besarnya kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat berpengaruh terhadap manajemen yaitu manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Penelitian yang dilakukan [4], menemukan bahwa besarnya kepemilikan saham manajerial yang lebih besar berpengaruh dalam melakukan penentuan pengukuran perencanaan pajak. Kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap penetapan kebijakan *effective tax rate*. Kepemilikan manajerial mempunyai total minimum kepemilikan saham sebesar 5%, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄:Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai *effective tax rate*

2.3.5 Komite Audit Internal

Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian [16]. Pembentukan komite audit merupakan suatu keharusan, karena komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan dan melakukan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Semakin kompleks organisasi perusahaan maka semakin tinggi tingkat kesulitan untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa setiap divisi atau unit sudah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam mengurangi risiko penyimpangan yang terjadi yang dapat dilakukan oleh orang dalam perusahaan, maka dibutuhkan adanya satu unit kerja khusus yang bertugas melakukan fungsi kontrol yaitu audit internal. Bapepam-LK melalui SK Ketua Bapepam-LK No. Kep.496/BL/2008 menerbitkan peraturan khusus No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang ditegaskan bahwa setiap emiten atau perusahaan publik wajib membentuk unit audit internal paling lambat 31 Desember 2009. Komite audit juga sangat berperan penting dan strategis dalam memelihara kredibilitas dalam proses penyusunan

laporan keuangan seperti menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai dan dan melaksanakan *corporate governance* yang baik. Keahlian dalam bidang keuangan adalah hal yang penting bagi komite audit karena fungsi utama dari komite tersebut adalah mengawasi proses pelaporan keuangan dalam sebuah perusahaan [15]. Apabila fungsi komite audit internal perusahaan berjalan secara efektif, maka konflik keagenan yang timbul akibat dari keinginan masing-masing manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi. Menurut peneliti [8], pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan dapat menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₅: Komite audit internal berpengaruh terhadap nilai *effective tax rate*

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2013 yang berjumlah 127 perusahaan. Jumlah sampel adalah sebanyak 27 perusahaan manufaktur yang kemudian dikalikan dengan lamanya periode pengamatan, sehingga data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 108. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria perusahaan masih terdaftar aktif dari tahun 2010-2013 dan perusahaan harus menerbitkan laporan tahunan dan laporan keangan secara lengkap.

3.2 Model Penelitian

Data dianalisis dengan menggunakan Eviews 7. program *Eviews 7* untuk menentukan model estimasi, pemilihan model regresi data panel (*Common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*) dan melakukan pengujian hipotesis. Selain itu, program ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *effective tax rate*.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol:

Size

Ukuran perusahaan biasanya ditandai dengan total aset disuatu perusahaan dan ukuran perusahaan tersebut juga akan berbanding terbalik dengan pembayaran pajak perusahaan [6]Perusahaan dengan tingkat pajak yang ukurannya tinggi biasanya relatif lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tingkat pajaknya rendah.

Debt

Manajemen menerbitkan hutang karena manajemen akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang beserta bunganya dimasa depan. [14], menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Pembayaran tersebut dapat dilakukan jika kinerja perusahaan baik, sehingga hutang dapat mengurangi masalah keagenan.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal suatu perusahaan dengan membandingkan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai [5]. Konsep kemampuan menghasilkan laba menunjukkan bahwa semakin meningkatnya laba tersebut secara langsung telah mempengaruhi tarif efektif perusahaan [8].

Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$ETR_{it} = a + \beta_1 UDK1_{it} + \beta_2 DK1_{it} + \beta_3 KI_{it} + \beta_4 KM_{it} + \beta_5 KAI_{it} + \beta_6 KAI_{it} + \beta_7 KAI_{it} + \beta_8 KAI_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : *Effective Tax Rate* (ETR)

a : Konstanta

β₁ UDK_{it} : Ukuran Dewan Komisaris

β₂ DK_{it} : Proporsi Dewan Komisaris Independen

β₃ KI_{it} : Kepemilikan Institusional

β₄ KM_{it} : Kepemilikan Manajerial

β₅ KAI_{it} : Komite Audit Internal

β₅ UP_{it} : Ukuran Perusahaan

β₅ UT_{it} : Utang

β₅ LB_{it} : Laba

ε_{it} : residual

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penentuan Model estimasi Regresi Data Panel

F Test (Chow Test)

Uji ini dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara *common effect* dan *fixed effect* dengan menggunakan uji *F test (chow test)*, dimana tingkat signifikansi sebesar 0.05. Berikut hasil pengujian *F test (chow test)*:

Tabel 1. F Test (Chow Test)

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.891341	-8.19	0.5421
Cross-section Chi-square	11.472224	8	0.1764

Berdasarkan table 1 diatas, besarnya probabilitas *cross-section* F adalah 0.5421. Nilai probabilitas *cross-section* F tersebut > 0.05, maka hasil dari Uji *F test* (*chow test*) menunjukkan bahwa model *common effect* (CE) lebih tepat dibandingkan dengan model *fixed effect* (FE) [20].

Hausman Test

Uji ini dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara *fixed effect* dan *random effect* dengan menggunakan *hausman test*, dimana tingkat signifikansi sebesar 0.05. Berikut hasil *hausman test*:

Tabel 2. Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.130726	8	0.5226

Berdasarkan table 2 diatas, besarnya probabilitas *cross-section* random adalah 0.5226. Nilai probabilitas *cross-section* random > nilai signifikan 0.05, maka hasil dari *hausman test* menunjukkan bahwa model *random effect* (RE) lebih tepat dibandingkan dengan model *fixed effect* (FE) [20].

Langrangge Multiplier (LM) Test

Uji ini dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara *Common Effect* dan *Random Effect* dengan menggunakan *Langarange Multiplier Test* (Uji LM) dengan rumus sebagai berikut:

$$LM_{hitung} = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{T^2 \sum e^{-2}}{\sum e^2} - 1 \right]^2$$

- n = Jumlah Perusahaan
- T = Jumlah Periode
- $\sum e^{-2}$ = Jumlah Rata-rata Kuadrat Residual
- $\sum e^2$ = Jumlah Residual Kuadrat

$$\begin{aligned} LM_{hitung} &= \frac{27 \cdot 4}{2(4-1)} \left[\frac{4^2(14.280)}{329.555} - 1 \right]^2 \\ &= \frac{108}{6} [-0.418]^2 \\ &= 18 [0.175] \\ &= \underline{3.145} \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus diatas, nilai LM_{hitung} adalah 3.145 < nilai *chi squared table* yaitu 11.07. Hasil dari *langrangge multiplier* (LM) test < nilai *chi squared table* menunjukkan bahwa *common effect* (CE) lebih tepat dibandingkan dengan model *random effect* (RE) [20]. Hasil ini sejalan dengan *F test* (*chow test*) dan *hausman test* yang menyatakan bahwa model yang terpilih dari ketiga model adalah model *Common Effect* (CE).

Hasil dari penentuan model estimasi regresi data panel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan model *common effect* (CE), berikut merupakan tabel untuk uji hipotesis:

Tabel 3. Analisis Regresi

Variabel	t	Sig.
Ukuran Dewan Komisaris	-1.42	0.041
Proporsi Dewan Komisaris Inependen	0.37	0.028
Kepemilikan Institusional	-0.20	0.016
Kepemilikan Manajerial	-0.37	0.381
Komite Audit Internal	-9.88	0.021
Debt	-7.64	0.313
Size	0.42	0.599
Profitabilitas	-1.11	0.000

Berdasarkan tabel 3 di atas, hipotesis pertama menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki nilai koefisien sebesar -1.425460 yang berarti berpengaruh negatif dan nilai probabilitas sebesar 0,0410 < 0.05 (nilai signifikansi). Nilai ini menunjukkan **H₁ diterima**, sehingga ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *effective tax rate*. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai koefisien sebesar 0.373931 dan nilai probabilitas sebesar 0.0287 < 0.05 (nilai signifikansi). Nilai ini menunjukkan **H₂ diterima**, proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *effective tax rate*. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kepemilikan saham institusional memiliki nilai koefisien sebesar -0.201156 sehingga berpengaruh negatif dan nilai probabilitas sebesar 0.0166 < 0.05 (nilai signifikansi). Nilai ini menunjukkan **H₃ diterima**, kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *effective tax rate*. Hipotesis keempat menunjukkan bahwa kepemilikan saham manajerial memiliki nilai koefisien sebesar -0.371960 yang berarti berpengaruh negatif dan nilai probabilitas sebesar 0.3814 > 0.05 (nilai signifikansi). Nilai ini menunjukkan **H₄ ditolak**, kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*. Hipotesis kelima menunjukkan bahwa komite audit internal memiliki nilai koefisien sebesar -9.888744 berarti berpengaruh

negatif dan nilai probabilitas sebesar $0.0211 < 0.05$ (nilai signifikansi). Nilai ini menunjukkan **H₀ diterima**, komite audit internal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *effective tax rate*. Variabel kontrol yaitu *debt* memiliki nilai koefisien sebesar -7.645281 berarti berpengaruh negatif nilai probabilitas sebesar $0.3136 > 0.05$ (nilai signifikansi), sehingga nilai ini menunjukkan bahwa *debt* tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*. Variabel kontrol yaitu *size* memiliki nilai koefisien sebesar 0.427548 dan nilai probabilitas sebesar $0.5995 < 0.05$ (nilai signifikansi), sehingga nilai ini menunjukkan bahwa *size* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate*. Variabel kontrol yaitu profitabilitas memiliki nilai koefisien sebesar -1.119878 berarti berpengaruh negatif nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$ (nilai signifikansi), sehingga nilai ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *effective tax rate*.

Hasil penelitian mengonfirmasi penelitian-penelitian terdahulu bahwa mekanisme *corporate governance* mempengaruhi pengelolaan pajak perusahaan. Peran elemen-elemen *corporate governance* sangat penting dalam pengaturan pajak perusahaan. *Corporate governance* yang baik membantu perusahaan untuk mengelola berapa pajak optimal yang harus dikeluarkan perusahaan. Ini sangat penting karena pengelolaan pajak dapat sebagai sarana efisiensi perusahaan dan menjauhkan perusahaan dari potensi kerugian membayar pajak berlebih.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi pengaruh *corporate governance* terhadap ETR. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit internal berpengaruh langsung terhadap *effective tax rate* (ETR). Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR). Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel perusahaan hanya menggunakan sampel di sektor manufaktur, data dalam penelitian ini hanya menggunakan jangka waktu pengamatan selama 4 tahun yaitu 2010-2013 dan penelitian ini dalam melakukan pengukuran penghindaran pajak hanya menggunakan *effective tax rate* (ETR). Saran dalam penelitian ini adalah penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan di sektor yang lebih luas dan tidak hanya pada sektor manufaktur supaya penelitian mampu mendapatkan hasil penelitian yang lebih *representative*, disarankan juga untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih luas

supaya hasil yang diperoleh lebih mewakili dan dapat digeneralisasi serta menggunakan pengukuran perencanaan pajak selain dari *effective tax rate* (ETR), seperti *Cash effective tax rate* dan lain sebagainya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Agoes, Sukrisno dan Ardana, I Cenik. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi, Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Boediono, Gideon. (2005). *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII Solo*.
- [3] Bonazzil dan Islam, S. (2007). Agency Theory and Corporate Governance: Study of Effectiveness of Board in Their Monitoring of the CEO. *Journal of Modelling in Management* Vo. 2 No. 1 , 7-23.
- [4] Boussaidi, A. and Hamed, M. S. (2015). The Impact of Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness: Empirical Evidence from Tunisian Context. *Asian Economic and Social Society Volume 5 (1)*.
- [5] Darmadi, I.N.H. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2 No 4* , hal 1-12.
- [6] Dyreng, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review* , 563-594.
- [7] Halperin, R. dan Sansing, R. (2005). Is the Effective Tax Rate an Effective Performance Measure. *SNNR Working Paper*.
- [8] Hanum, Hashemi Rodhian. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal of Accounting Volume 2 No. 2* , 1-10.
- [9] Husnan, Suad. (2001). Corporate Governance di Indonesia Pengamatan terhadap Sektor Korporat dan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Manajemen Ekonomi Volume 1 No. 01*.
- [10] Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics Vol. 3* , 35-60.
- [11] Karayan, J. E. dan Swenson, Charles W. (2007). *Strategic Business Tax Planning*. (2, Ed.) Canada: Jhon Wiley & Sons.
- [12] Khurana, I.K. dan Moser, W.J.;. (2009). Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. *AAA 2010 Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper*.
- [13] Minnick, Kristina dan Noga, Tracy. (2010). Do Corporate Governance Characteristic Influence Tax Management? *Journal of Corporate Finance Vol. 16* , 703-718.
- [14] Prabowo, Yusdianto. (2006). *Akuntansi Perpajakan terapan*. Jakarta: Grasindo.
- [15] Rahman, R.A. dan Ali, M. (2006). Board, Audit Committee Culture and Earnings Management: Malaysia Evidence Vol. 21, No.7. *Managerial Auditing Journal* , 783-804.
- [16] Setiawan, Teguh. (2009). Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Praktek Manajemen Laba pada

perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2007. *Akuntansi Kontemporer Volume 1* , 99-122.

[17] Surya, Indra dan Yutiavandana, Ivan. (2006). Penerapan Corporate Governance Mengesampingkan Hak Istimewa dengan Kelangsungan Usaha. *Prenada Media Group*.

[18] Suyanto, K. D., Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal keuangan dan Perbankan vol. 16, No.2* , 167-177.

[19] Wignjohartojo, P. (2001). Good Corporate Governance: Implementasi beserta implikasi dan masa depannya. *Majalah Ekonomi tahun XI No. 1* , hal. 64-77.

[20] Winanda, Arsita Putri. (2009). Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan. *Simposium Akuntansi*.

[21] Winarno, Wing Wahyu. (2011). *Analisi Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews edisi 3*. Yogyakarta: Percetakan UPP STIM YKPB.